

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebijakan publik merupakan instrumen utama dalam upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan sosial, termasuk kemiskinan. Salah satu bentuk kebijakan publik yang berorientasi pada kesejahteraan sosial adalah program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Kedua program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui transfer bantuan tunai dan pangan yang diharapkan dapat memperbaiki kondisi ekonomi serta akses terhadap kebutuhan dasar (Kementerian Sosial, 2023: 12). Namun, dalam implementasinya, kebijakan bantuan sosial sering menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidaktepatan sasaran, ketidakefisienan dalam alokasi anggaran, serta lemahnya responsivitas terhadap perubahan kondisi sosial ekonomi penerima manfaat. Oleh karena itu, evaluasi terhadap efektivitas dan pemerataan kebijakan ini menjadi penting untuk memastikan bahwa tujuan program dapat tercapai secara optimal (Bappenas, 2022: 45).

Kemiskinan adalah persoalan kompleks yang menjadi tantangan besar dalam upaya pemerintah mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, seperti yang diamanatkan dalam dasar negara. Masalah ini tidak terbatas pada wilayah tertentu, tetapi menyebar luas di seluruh Indonesia, termasuk di Provinsi Sulawesi Barat. Sebagai langkah untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah meluncurkan sejumlah program

bantuan sosial, antara lain Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). PKH dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui pemberian bantuan tunai secara rutin, sementara BPNT menyediakan bantuan dalam bentuk pangan bagi rumah tangga miskin.

Berdasarkan data dari Portal APBN Kementerian Keuangan, anggaran untuk pengentasan kemiskinan dialokasikan untuk berbagai kegiatan yang bertujuan membantu masyarakat berpenghasilan rendah dan mengurangi kemiskinan. Anggaran tersebut mencakup belanja Pemerintah Pusat, yang meliputi berbagai program dan kegiatan di sejumlah Kementerian/Lembaga, seperti Kementerian Sosial dan Kementerian Dalam Negeri, serta alokasi non-Kementerian/Lembaga, termasuk subsidi pangan (bantuan beras bagi keluarga prasejahtera) dan pembiayaan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui penyertaan modal negara.

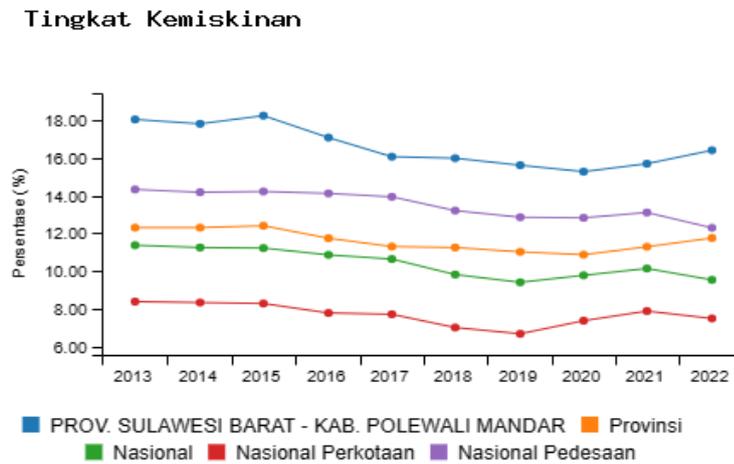
Dari tahun 2013 hingga 2022, total anggaran yang dialokasikan untuk perlindungan sosial mencapai Rp3.399,87 triliun. Dari jumlah tersebut, alokasi untuk PKH yang dimulai pada tahun 2013 mencapai Rp180,92 triliun, sedangkan BPNT yang diluncurkan pada tahun 2017 hingga saat ini mencapai Rp173,77 triliun. Selain itu, terdapat program lain seperti Bantuan Subsidi Upah dan Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro pada tahun 2020, masing-masing sebesar Rp29,48 triliun dan Rp28,65 triliun (Portal Data APBN, 2023). Secara keseluruhan, anggaran untuk program pengentasan kemiskinan meningkat dari Rp27,3 triliun menjadi Rp37,8 triliun. Pada tahun 2022, alokasi untuk pengentasan kemiskinan mencapai

Rp431,5 triliun, yang mencakup berbagai program seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program Kartu Sembako, Kartu PraKerja, dan lainnya.

Di Sulawesi Barat, evaluasi terhadap PKH dan BPNT menjadi sangat relevan mengingat karakteristik geografis, demografis, serta tantangan sosial-ekonomi di provinsi tersebut. Dengan evaluasi menyeluruh, dapat diketahui sejauh mana kedua program tersebut mampu mencapai sasaran yang diinginkan di wilayah ini. Provinsi Sulawesi Barat mencatat peningkatan persentase penduduk miskin selama periode 2014 hingga 2022 diantara provinsi di Sulawesi, Sulawesi Barat menunjukkan peningkatan tertinggi dalam persentase kemiskinan. Jumlah penduduk miskin tertinggi tercatat pada September 2021, sementara jumlah terendah terjadi pada September 2016. Angka kemiskinan tertinggi terjadi pada Maret 2014, sedangkan angka terendah tercapai pada Maret 2020, dengan persentase 10,87 persen (BPS Sulbar, 2023: 62). Hal ini menunjukkan tantangan signifikan terkait kemiskinan di wilayah tersebut. Penurunan persentase kemiskinan pada Maret 2020 memberikan indikasi adanya potensi dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi perubahan ini dan menyusun kebijakan yang efektif untuk mengurangi kemiskinan di Sulawesi Barat. Analisis perbandingan tingkat kemiskinan Sulawesi Barat dengan rata-rata nasional dan provinsi lain menggunakan data dari Sistem Perencanaan, Penganggaran, Analisis, dan Evaluasi Kemiskinan Terpadu (SEPAKAT)

Bappenas RI memberikan wawasan tambahan yang dapat mendukung evaluasi program.



Gambar 1. 1. Tingkat kemiskinan Provinsi Sulawesi Barat 2013-2022

Upaya pengentasan kemiskinan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Masalah ini telah menjadi prioritas nasional yang membutuhkan perhatian dari berbagai sektor dan pemangku kepentingan. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), target pengurangan angka kemiskinan telah ditetapkan sebagai salah satu tujuan strategis. Di tingkat daerah, hal ini diatur dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pada tahun 2018, Indonesia mencatat pencapaian angka kemiskinan satu digit, yang menjadi tonggak penting dalam penurunan angka kemiskinan selama dua dekade terakhir. Penurunan angka kemiskinan secara konsisten menunjukkan kemajuan dalam upaya menuju Indonesia bebas kemiskinan. Secara konseptual, kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (Mikelsen, 2003). Kondisi ini mencerminkan keterbatasan sumber daya yang

menghalangi individu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Soegijoko, 1997 dalam Yulianto, 2022).

Jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir. Data menunjukkan bahwa pada September 2020, terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin sebesar 1,13 juta dibandingkan Maret 2020, dan 2,76 juta dibandingkan September 2019. Persentase kemiskinan meningkat dari 9,22% pada 2019 menjadi 10,19% pada 2020. Meskipun demikian, tren jangka panjang dari 2012 hingga 2019 menunjukkan penurunan angka kemiskinan. Pada 2012, jumlah penduduk miskin mencapai 29,25 juta, sementara pada Maret 2019 turun menjadi 25,14 juta. Survei BPS juga menunjukkan bahwa peningkatan kemiskinan lebih besar terjadi di perkotaan dibandingkan pedesaan. Pada 2020, kenaikan kemiskinan di perkotaan mencapai 1,32%, sementara di pedesaan hanya 0,60%. Kondisi ini menekankan perlunya kebijakan yang lebih efektif untuk mengurangi kemiskinan, terutama di wilayah perkotaan.

Berdasarkan teori William N. Dunn, evaluasi kebijakan publik adalah proses untuk menilai apakah kebijakan telah mencapai tujuan yang diharapkan. Proses ini mencakup penyediaan informasi valid tentang kinerja kebijakan, analisis terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan, serta penerapan metode analisis kebijakan lainnya, termasuk rekomendasi perbaikan (Dunn, 2003). Dalam studi kebijakan publik, evaluasi kebijakan merupakan tahapan penting untuk menilai apakah suatu kebijakan telah berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

William N. Dunn (2003: 609) mengemukakan bahwa evaluasi kebijakan dapat dilakukan melalui lima dimensi utama, yaitu: Efektivitas – Sejauh mana kebijakan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks PKH dan BPNT, efektivitas dapat diukur dengan menilai dampaknya terhadap penurunan angka kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan penerima manfaat (Dunn, 2003: 612). Efisiensi – Mengacu pada perbandingan antara input (sumber daya yang digunakan) dan output (hasil yang diperoleh). Evaluasi terhadap efisiensi PKH dan BPNT dapat dilakukan dengan menganalisis data anggaran serta membandingkannya dengan dampak yang dihasilkan (Dunn, 2003: 614). Kecukupan – Menilai apakah kebijakan cukup dalam mengatasi permasalahan yang menjadi sasaran. Dalam penelitian ini, kecukupan dinilai berdasarkan sejauh mana bantuan yang diberikan dapat memenuhi kebutuhan dasar penerima manfaat (Dunn, 2003: 616). Pemerataan (Equity) – Berkaitan dengan ketepatan sasaran penerima manfaat. Dimensi ini menjadi fokus utama dalam penelitian karena berkaitan dengan keadilan dalam distribusi bantuan sosial. Penelitian ini akan menganalisis apakah semua orang miskin di Sulawesi Barat telah menerima PKH dan BPNT, serta apakah penerima manfaat benar-benar berasal dari kelompok miskin (Dunn, 2003: 618). Responsivitas – Mengukur sejauh mana kebijakan merespons kebutuhan dan harapan masyarakat. Evaluasi ini akan melihat apakah PKH dan BPNT telah mempertimbangkan perubahan sosial ekonomi penerima manfaat serta bagaimana pemerintah menyesuaikan kebijakan terhadap kondisi yang berkembang (Dunn, 2003: 620).

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan PKH dan BPNT di Provinsi Sulawesi Barat. Pendekatan evaluasi yang digunakan adalah evaluasi formatif, yang bertujuan menilai pelaksanaan program berdasarkan dimensi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, dan responsivitas. Evaluasi ini akan dilakukan dengan metode kuantitatif melalui survei berbasis skala Likert untuk menilai dimensi tersebut. Data mengenai efisiensi akan diperoleh dari anggaran program dan jumlah penerima bantuan, sedangkan data tingkat kemiskinan diambil dari laporan resmi BPS Sulawesi Barat. Analisis data akan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif (*mix methode*) untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang kinerja program dalam pengentasan kemiskinan.

Melalui penelitian ini, diharapkan diperoleh rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program PKH dan BPNT di Provinsi Sulawesi Barat, sehingga dapat memberikan dampak yang lebih besar dalam mengatasi masalah kemiskinan.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Se jauh mana efektivitas kebijakan PKH dan BPNT dalam mencapai tujuan yang diharapkan?
2. Bagaimana efisiensi penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan PKH dan BPNT?
3. Apakah kebijakan PKH dan BPNT sudah mencukupi untuk menyelesaikan masalah kemiskinan?
4. Bagaimana pemerataan distribusi manfaat kebijakan PKH dan BPNT di masyarakat?
5. Se jauh mana responsivitas kebijakan PKH dan BPNT terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat?

Dengan merumuskan masalah penelitian ini berdasarkan 5 dimensi teori evaluasi William Dunn, diharapkan dapat membangun landasan yang kokoh untuk melakukan analisis mendalam terkait kebijakan program bantuan sosial PKH dan BPNT di Provinsi Sulawesi Barat.

1.3. Tujuan Penelitian

Berikut adalah tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang diberikan:

1. Menganalisis kebijakan PKH dan BPNT memenuhi dimensi efektivitas dalam mencapai tujuan yang diharapkan.
2. Mengevaluasi tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan PKH dan BPNT.
3. Menilai kecukupan hasil kebijakan PKH dan BPNT dalam menyelesaikan masalah kemiskinan.
4. Mengkaji ketepatan sasaran penerima manfaat kebijakan PKH dan BPNT di masyarakat.
5. Menilai responsivitas kebijakan PKH dan BPNT terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, dan responsivitas kebijakan PKH dan BPNT dalam konteks kebijakan sosial.

1.4. Manfaat Penelitian

1. **Manfaat akademis:** Memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang evaluasi kebijakan sosial. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur

terkait evaluasi kebijakan sosial dengan pendekatan lima dimensi evaluasi menurut William Dunn.

2. **Manfaat praktis:** Menyediakan masukan dan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dan pelaksana program PKH dan BPNT untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, dan responsivitas kebijakan. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk perbaikan implementasi kebijakan dan alokasi sumber daya yang lebih optimal.
3. **Manfaat Sosial:** Memberikan wawasan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan tentang sejauh mana kebijakan PKH dan BPNT telah memenuhi kebutuhan mereka. Hal ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan dan advokasi untuk perbaikan kebijakan sosial di masa depan.
4. **Manfaat kebijakan publik:** Menyediakan data empiris yang relevan bagi pengambil kebijakan untuk mengkaji ulang dan mengembangkan kebijakan sosial yang lebih inklusif, adil, dan efektif dalam mengatasi masalah kemiskinan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep dan Teori Kebijakan Publik

Definisi Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah serangkaian keputusan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi isu-isu strategis yang memengaruhi masyarakat luas. Konsep ini dapat dipahami melalui berbagai definisi dari para ahli. David Easton (1953) Kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara otoritatif untuk masyarakat. Definisi ini menekankan pada fungsi pemerintah sebagai aktor utama dalam menetapkan nilai-nilai yang dianggap penting bagi kepentingan bersama. Thomas Dye (1972) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah apa yang pemerintah pilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Pandangan ini menyoroti aspek tindakan aktif maupun pasif pemerintah. James E. Anderson (1979) kebijakan publik didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu, yang dibuat oleh aktor pemerintah sebagai respons terhadap suatu masalah publik.

Dalam konteks Indonesia, kebijakan publik sering diorientasikan untuk menjawab tantangan sosial, ekonomi, dan budaya yang dihadapi masyarakat. Contohnya adalah kebijakan bantuan sosial PKH dan BPNT menjadi instrumen pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Kementerian Sosial RI, 2021; Bappenas, 2020). PKH dirancang untuk memberikan bantuan tunai bersyarat bagi keluarga miskin agar dapat mengakses pendidikan dan layanan kesehatan, sedangkan BPNT bertujuan untuk meningkatkan

ketahanan pangan dan gizi keluarga miskin melalui pemberian bantuan dalam bentuk bahan pangan (TNP2K, 2019).

Dimensi Kebijakan Publik

Dimensi kebijakan publik merujuk pada elemen-elemen fundamental yang memengaruhi dan menentukan perumusan, implementasi, serta evaluasi kebijakan (Dunn, 2003). Memahami dimensi ini membantu peneliti dan pembuat kebijakan untuk menganalisis kebijakan secara menyeluruh dan mengidentifikasi faktor-faktor kunci keberhasilannya. Dimensi kebijakan publik mencakup aspek-aspek utama seperti isi, konteks, dan proses kebijakan. Dimensi ini mencerminkan hubungan antara kebijakan dengan lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang memengaruhinya (Dye, 2017; Howlett & Ramesh, 2003). Menurut Dunn (2003), dimensi kebijakan mencakup elemen-elemen yang menjadi dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan untuk mencapai tujuan tertentu.

1. Dimensi utama kebijakan publik

Kebijakan publik umumnya dianalisis melalui tiga dimensi utama yaitu isi (*content*), konteks (*context*), dan proses (*process*) (Anderson, 1975; Dunn, 2003). Berikut penjelasannya: menurut Howlett dan Ramesh (2003) dimensi isi kebijakan (*Policy Content*): dimensi ini berfokus pada substansi kebijakan, yaitu apa yang terkandung dalam kebijakan tersebut. Aspek-aspek yang termasuk dalam dimensi ini meliputi: tujuan kebijakan yaitu apa yang ingin dicapai melalui kebijakan. Sasaran kebijakan kelompok

masyarakat atau isu yang menjadi fokus kebijakan. Strategi kebijakan pendekatan atau langkah yang diambil untuk mencapai tujuan. Alokasi sumber daya dana, tenaga, dan waktu yang dialokasikan untuk implementasi kebijakan (Rossi, Lipsey, & Freeman, 2004). Dalam program PKH, isi kebijakan mencakup pemberian bantuan tunai bersyarat kepada keluarga miskin dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan pendidikan (Kementerian Sosial, 2023).

2. Dimensi konteks kebijakan (*Policy context*)

Dimensi konteks mencerminkan lingkungan di mana kebijakan dirumuskan dan diimplementasikan. Konteks ini dapat memengaruhi keberhasilan atau kegagalan kebijakan (Dunn, 2003). Aspek penting dari dimensi ini adalah: Konteks sosial: Nilai-nilai, budaya, dan norma masyarakat, Konteks ekonomi: Kondisi ekonomi, seperti pendapatan nasional, pengangguran, atau inflasi (Bappenas, 2020), Konteks politik: Stabilitas politik, dukungan legislatif, dan pengaruh aktor politik. Konteks hukum: Kerangka peraturan dan undang-undang yang mendukung kebijakan (Easton, 1953). dan terakhir Konteks teknologi: Kemajuan teknologi yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan. Berkaitan dengan kebijakan BPNT, konteks sosial dan ekonomi sangat penting untuk memastikan kebijakan ini dapat mengurangi kerentanan pangan tanpa menciptakan ketergantungan (Kementerian Sosial, 2023).

3. Dimensi proses kebijakan (*Policy Process*)

Dimensi ini mencakup tahapan dan mekanisme dalam perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Anderson (1975) menjelaskan

bahwa proses kebijakan publik melibatkan lima tahapan utama mencakup: Identifikasi masalah mengenali isu yang memerlukan intervensi kebijakan. Formulasi kebijakan: merancang solusi dan strategi untuk mengatasi masalah. Adopsi kebijakan: Proses legalisasi kebijakan oleh pemerintah. Implementasi kebijakan: Pelaksanaan kebijakan di lapangan, melibatkan distribusi sumber daya dan layanan (Stufflebeam & Shinkfield, 2007). Evaluasi kebijakan: Penilaian terhadap keberhasilan kebijakan dalam mencapai tujuannya (Dunn, 2003). Dalam hal ini seperti contoh proses pelaksanaan Dana Desa melibatkan tahap identifikasi kebutuhan masyarakat desa, perencanaan pembangunan, dan evaluasi dampak terhadap pembangunan lokal (Kementerian Desa, 2023).

4. Dimensi pendukung kebijakan publik

Selain tiga dimensi utama, terdapat dimensi pendukung yang perlu dipertimbangkan: Dimensi keberlanjutan (*Sustainability*): Seberapa jauh kebijakan mempertimbangkan dampak jangka panjang, baik pada aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan (UNDP, 2022), Dimensi kesetaraan (*Equity*): Apakah kebijakan memperhatikan keadilan dalam distribusi manfaat kepada semua kelompok masyarakat, termasuk kelompok rentan (Sumarto, Suryahadi, & Pritchett, 2003) dan Dimensi responsivitas (*Responsiveness*): Seberapa baik kebijakan memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat (Nugroho, 2008). Seperti contoh kebijakan perhutanan sosial di Indonesia bertujuan menciptakan keberlanjutan melalui pelibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan (Kementerian Lingkungan Hidup, 2023).

5. Relevansi dimensi kebijakan publik di Indonesia

Penerapan dimensi kebijakan publik di Indonesia sangat penting dalam menghadapi berbagai tantangan nasional, seperti: Ketimpangan sosial ekonomi: Dimensi kesetaraan menjadi krusial dalam kebijakan sosial seperti PKH dan BPNT, desentralisasi: Dimensi konteks sangat relevan dalam kebijakan Dana Desa, di mana pemerintah daerah diberi otonomi untuk merancang kebijakan lokal (Kementerian Desa, 2023) dan Pembangunan berkelanjutan: Dimensi keberlanjutan harus dipertimbangkan dalam kebijakan terkait lingkungan, seperti pengelolaan sumber daya alam.

Teori-Teori Kebijakan Publik

Berbagai teori kebijakan publik memberikan kerangka konseptual untuk memahami proses dan dinamika kebijakan:

1. Teori rasionalitas (*Rational choice theory*): Teori ini berasumsi bahwa pembuat kebijakan bertindak secara rasional untuk memaksimalkan manfaat dan meminimalkan kerugian berdasarkan analisis data dan bukti.
2. Teori inkremental (*Incrementalism*): Dikembangkan oleh Charles E. Lindblom, teori ini menjelaskan bahwa perubahan kebijakan biasanya dilakukan secara bertahap dan jarang bersifat revolusioner. Dalam konteks kebijakan sosial, pendekatan ini sering digunakan untuk menyempurnakan program yang sudah ada.
3. Teori sistem (*Systems theory*): Diperkenalkan oleh David Easton, teori ini menggambarkan kebijakan sebagai hasil dari input (masukan)

berupa tuntutan masyarakat dan output (keluaran) berupa keputusan atau program pemerintah.

4. *Multiple streams framework (Kingdon)*: Teori ini menyatakan bahwa kebijakan terbentuk ketika tiga aliran (masalah, kebijakan, dan politik) bertemu dalam suatu jendela kebijakan (*policy window*).
5. Teori jaringan kebijakan (*Policy network theory*): Menekankan pentingnya kolaborasi antara aktor pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam proses pembuatan kebijakan.
6. Teori implementasi kebijakan (*Implementation theory*): Teori ini menyoroti bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya bergantung pada perumusannya, tetapi juga pada pelaksanaannya di lapangan. Faktor seperti kapasitas institusi dan partisipasi masyarakat sangat menentukan.

Tahapan Kebijakan Publik

Tahapan kebijakan publik mencakup berbagai langkah yang memungkinkan kebijakan dirumuskan, diimplementasikan, dan dievaluasi dengan sistematis. William N. Dunn (2003) dan Anderson (1975) mengidentifikasi lima tahapan utama dalam siklus kebijakan publik:

1. Identifikasi masalah: Pemerintah mengidentifikasi isu-isu yang membutuhkan intervensi. Tahap ini melibatkan pengumpulan data, analisis situasi, dan konsultasi dengan masyarakat untuk menentukan prioritas kebijakan (Rossi, Lipsey, & Freeman, 2004). Contoh

identifikasi tingginya angka kemiskinan mendorong perumusan Program PKH.

2. Formulasi kebijakan: Pengembangan solusi berbasis bukti melalui penelitian dan konsultasi dengan pemangku kepentingan. Tahap ini membutuhkan analisis teknis, politik, dan ekonomi (Dunn, 2003). Contoh kebijakan BPNT dirancang untuk mengatasi ketidakcukupan distribusi pangan secara efisien.
3. Adopsi kebijakan: Pengambilan keputusan untuk menerapkan solusi tertentu melalui legislasi atau regulasi (Anderson, 1975). Contoh Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi dasar hukum Dana Desa.
4. Implementasi kebijakan: Pelaksanaan kebijakan di lapangan, termasuk alokasi sumber daya dan koordinasi antar-lembaga (Stufflebeam & Shinkfield, 2007). Contoh Penyaluran dana PKH melalui sistem perbankan dan kerja sama dengan Kementerian Sosial.
5. Evaluasi kebijakan: Penilaian efektivitas kebijakan dalam mencapai tujuannya dan mengidentifikasi area untuk perbaikan (Patton, 2008). Contoh evaluasi BPNT menilai dampaknya terhadap ketahanan pangan keluarga miskin.

Paradigma Kebijakan Publik

Paradigma kebijakan publik mencerminkan kerangka berpikir atau pendekatan dominan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan.

Kuhn (1962) menjelaskan bahwa paradigma merupakan cara disiplin ilmu memahami realitas, dan dalam kebijakan publik, paradigma ini terus berevolusi seiring perubahan sosial, politik, dan ekonomi. Berikut evolusi paradigma kebijakan publik:

1. Paradigma klasik (*Traditional public administration*): Fokus pada peran negara sebagai aktor utama. Karakteristik: hierarkis, top-down, dan birokratis (Anderson, 1975). contoh kebijakan sentralistik Orde Baru yang menitikberatkan pada stabilitas politik.
2. Paradigma *new public management* (NPM): Didorong oleh neoliberal pada 1980-an, dengan fokus pada efisiensi dan efektivitas (Hood, 1991). Karakteristik: Privatisasi, deregulasi, dan pengelolaan berbasis pasar. Contoh Privatisasi BUMN dan kemitraan publik-swasta (PPP) dalam pembangunan infrastruktur.
3. Paradigma governance: Menekankan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta (Rhodes, 1996). Karakteristik: inklusivitas, partisipasi, dan transparansi. Contoh Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) dengan melibatkan banyak pemangku kepentingan.
4. Paradigma *evidence-based policy* (EBP): Menggunakan data dan bukti ilmiah untuk mendukung keputusan kebijakan (Nutley, Davies, & Walter, 2007). Contoh penanganan COVID-19 berbasis epidemiologi di Indonesia.
5. Paradigma *behavioral public policy*: Menggunakan ilmu perilaku untuk memahami respons masyarakat terhadap kebijakan (Thaler &

Sunstein, 2008). Contoh insentif pajak untuk mendorong kepatuhan masyarakat.

Relevansi Kebijakan Publik Pada Konteks Indonesia

Kebijakan publik di Indonesia relevan untuk menghadapi berbagai tantangan lokal, seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, dan keberlanjutan pembangunan. Kebijakan bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) telah diimplementasikan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial (Kementerian Sosial RI, 2021). Selain itu, kebijakan Dana Desa memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengatasi tantangan lokal sesuai kebutuhan masing-masing wilayah (Kementerian Desa, 2023). Dalam hal keberlanjutan pembangunan, kebijakan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan menjadi instrumen penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan pembangunan ekonomi (Bappenas, 2022; KLHK, 2021). Contoh relevansi kebijakan publik:

1. Program Keluarga Harapan (PKH): Memberikan bantuan bersyarat untuk mendukung pendidikan dan kesehatan keluarga miskin. Relevansi: Menyasar pengentasan kemiskinan di wilayah pedesaan (Kementerian Sosial, 2023).
2. Dana Desa: Memberikan otonomi kepada desa untuk menentukan prioritas pembangunan lokal. Relevansi: Mendukung desentralisasi dan pemberdayaan masyarakat desa (Kementerian Desa, 2023).
3. Rencana aksi nasional penurunan emisi gas rumah kaca (RAN-GRK): Mendukung pengurangan emisi karbon untuk menghadapi perubahan

iklim. Relevansi: Komitmen Indonesia terhadap keberlanjutan dan SDGs (UNDP, 2022).

Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan adalah langkah sistematis untuk menilai sejauh mana kebijakan publik telah mencapai tujuan yang ditetapkan, serta dampaknya terhadap masyarakat. Evaluasi ini merupakan bagian penting dari siklus kebijakan karena memberikan dasar ilmiah untuk pengambilan keputusan di masa depan (Dunn, 2003). Evaluasi kebijakan dapat didefinisikan sebagai proses pengumpulan dan analisis informasi untuk menentukan efektivitas, efisiensi, relevansi, dan dampak kebijakan publik (Rossi, Lipsey, & Freeman, 2004). William N. Dunn (2003) menekankan bahwa evaluasi kebijakan adalah alat utama untuk memahami kinerja kebijakan dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Definisi tambahan oleh Anderson (1975): Evaluasi kebijakan adalah tahap dalam siklus kebijakan yang bertujuan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan. Patton (2008) evaluasi adalah pendekatan yang berfokus pada penggunaan hasil evaluasi untuk meningkatkan kinerja kebijakan.

Evaluasi kebijakan bertujuan untuk mengukur efektivitas apakah kebijakan telah mencapai tujuan yang ditetapkan. Meningkatkan efisiensi menilai apakah sumber daya yang digunakan sebanding dengan hasil yang dicapai. Mengidentifikasi dampak memahami dampak langsung dan tidak langsung dari kebijakan terhadap masyarakat (Rossi et al., 2004). Memberikan masukan memberikan rekomendasi untuk memperbaiki atau

menghentikan kebijakan. Contoh evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) bertujuan untuk menentukan apakah program tersebut berhasil mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia dan meningkatkan akses pendidikan bagi keluarga miskin (Kementerian Sosial, 2023).

Evaluasi kebijakan mencakup beberapa dimensi utama yaitu Input: Sumber daya yang digunakan, seperti anggaran, tenaga kerja, dan infrastruktur. Proses: Pelaksanaan kebijakan di lapangan, termasuk kendala dan efisiensinya. Output: Hasil langsung dari kebijakan, seperti jumlah penerima manfaat atau fasilitas yang dibangun. Outcome: Dampak jangka menengah dari kebijakan, seperti peningkatan kualitas hidup masyarakat. Impact: Dampak jangka panjang terhadap perubahan sosial, ekonomi, atau lingkungan (Stufflebeam & Shinkfield, 2007). Contoh dalam Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), evaluasi dapat mencakup analisis input (alokasi anggaran), output (jumlah bantuan yang disalurkan), dan impact (peningkatan ketahanan pangan di keluarga penerima manfaat).

2.2.1. Pendekatan Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan memiliki berbagai pendekatan yang dapat digunakan untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan suatu kebijakan (Stufflebeam & Shinkfield, 2007; Dunn, 2018). Pendekatan ini dirancang untuk mengumpulkan informasi yang valid dan memberikan wawasan tentang pelaksanaan kebijakan, hasil, serta dampak yang dicapai (Patton, 2015; Rossi, Lipsey, & Freeman, 2004).

1. Evaluasi semu (*Pseudo evaluation*)

Pendekatan evaluasi semu menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid mengenai hasil-hasil kebijakan tanpa mempertimbangkan nilai manfaat dari hasil tersebut bagi individu atau masyarakat (Vedung, 2010; Rossi, Lipsey, & Freeman, 2004). Asumsi utama dari evaluasi ini adalah bahwa manfaat kebijakan dianggap jelas atau tidak memerlukan penilaian yang mendalam terhadap dampaknya (Dunn, 2018). Misalnya, sebuah program sosial yang memberikan bantuan langsung tunai dapat dievaluasi hanya berdasarkan data jumlah penerima manfaat tanpa mempertimbangkan apakah bantuan tersebut benar-benar meningkatkan kesejahteraan atau memberdayakan masyarakat penerima (Patton, 2015).

Meskipun evaluasi semu memberikan data dasar yang berguna, pendekatan ini sering dikritik karena kurang memperhatikan dampak kebijakan terhadap isu-isu mendasar, seperti ketimpangan sosial, keberlanjutan program, dan distribusi manfaat di kalangan kelompok sasaran (Vedung, 2010; Dunn, 2018). Pendekatan ini cenderung hanya berfokus pada hasil yang terlihat secara kuantitatif tanpa menggali lebih dalam implikasi kebijakan terhadap keadilan dan efektivitas jangka panjang (Rossi, Lipsey, & Freeman, 2004).

2. Evaluasi formal (*Formal evaluation*)

Pendekatan evaluasi formal melibatkan penilaian yang didasarkan pada tujuan dan target yang telah dinyatakan secara resmi oleh pembuat kebijakan atau pengelola program (Dunn, 2018; Vedung, 2010). Berbeda dengan evaluasi semu, evaluasi formal mempertimbangkan manfaat dan

nilai dari hasil kebijakan berdasarkan indikator yang telah dirumuskan sebelumnya (Rossi, Lipsey, & Freeman, 2004). Evaluasi ini biasanya menggunakan metode kuantitatif maupun kualitatif untuk memastikan keandalan informasi yang dihasilkan (Patton, 2015; Dye, 2017).

Pendekatan evaluasi formal mencakup berbagai tipe evaluasi yang dirancang untuk menilai efektivitas kebijakan pada tahapan yang berbeda. Beberapa tipe evaluasi tersebut meliputi: Evaluasi sumatif: Berfokus pada penilaian pencapaian tujuan setelah suatu program dilaksanakan dalam periode tertentu. Evaluasi ini digunakan untuk menilai keberhasilan program dalam jangka panjang dan memberikan gambaran akhir tentang dampak serta efektivitas kebijakan (Stufflebeam & Shinkfield, 2007; Rossi, Lipsey, & Freeman, 2004). Evaluasi Formatif: Menitikberatkan pada penilaian proses pelaksanaan program dengan tujuan memberikan umpan balik untuk perbaikan di masa mendatang. Evaluasi ini dilakukan secara berkelanjutan selama program berjalan untuk memastikan kebijakan tetap sesuai dengan rencana dan dapat disesuaikan dengan kondisi lapangan (Patton, 2015; Dunn, 2018). Pendekatan evaluasi ini membantu pembuat kebijakan memahami tidak hanya hasil akhir dari kebijakan, tetapi juga bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan dan ditingkatkan secara berkala (Dunn, 2018; Patton, 2015). Dengan memahami kedua aspek ini, pembuat kebijakan dapat mengidentifikasi kelemahan dalam pelaksanaan serta merumuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk memastikan kebijakan lebih efektif dan efisien dalam jangka panjang (Stufflebeam & Shinkfield, 2007).

3. Variasi evaluasi formal

Evaluasi formal dapat dikategorikan berdasarkan kontrol terhadap aksi kebijakan dan orientasi terhadap proses kebijakan (Vedung, 2010; Rossi, Lipsey, & Freeman, 2004). Tabel berikut menunjukkan variasi utama evaluasi formal:

Tabel 2. 1. Variasi evaluasi formal

Kontrol terhadap Aksi Kebijakan	Orientasi terhadap Proses Kebijakan
Formatif	Sumatif
Langsung	Evaluasi Perkembangan
Tidak Langsung	Evaluasi Proses Retrospektif

Sumber: Buku evaluasi kebijakan William N. Dunn (2003)

Evaluasi formatif biasanya dilakukan untuk memperbaiki kebijakan selama implementasi, sedangkan evaluasi sumatif dilakukan setelah kebijakan berakhir untuk menentukan efektivitasnya (Patton, 2015). Setiap jenis evaluasi formal memiliki karakteristik unik, yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Evaluasi perkembangan

Evaluasi ini dirancang untuk memberikan umpan balik kepada pelaksana program secara langsung, sehingga memungkinkan pengelola program melakukan penyesuaian selama pelaksanaan berlangsung (Patton, 2015; Stufflebeam & Shinkfield, 2007). Pendekatan ini sangat bermanfaat dalam situasi yang memerlukan adaptasi cepat terhadap perubahan kondisi di lapangan. Dalam program bantuan sosial seperti PKH dan BPNT, evaluasi perkembangan dapat digunakan untuk memantau distribusi manfaat secara real-time dan mengidentifikasi kendala teknis yang memerlukan tindakan segera (Kementerian Sosial RI, 2021). Dengan

pendekatan ini, efektivitas dan efisiensi program dapat terus ditingkatkan selama proses implementasi berlangsung.

2. Evaluasi proses retrospektif

Evaluasi proses retrospektif dilakukan setelah program selesai dijalankan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dalam memenuhi standar dan aturan yang ditetapkan (Rossi, Lipsey, & Freeman, 2004). Variasi ini memberikan wawasan tentang tantangan yang dihadapi selama implementasi, serta sejauh mana program mampu mencapai hasil yang diinginkan (Vedung, 2010). Evaluasi retrospektif cocok untuk menilai program yang memiliki banyak variabel kompleks dan memerlukan analisis mendalam terhadap kendala pelaksanaan (Patton, 2015).

3. Evaluasi eksperimental

Pendekatan ini menggunakan prinsip eksperimen ilmiah dengan mengontrol variabel masukan dan proses kebijakan secara ketat (Rossi, Lipsey, & Freeman, 2004). Evaluasi eksperimental memungkinkan pembuat kebijakan untuk menguji hipotesis tentang dampak suatu program dalam kondisi yang terkontrol (Dunn, 2018). Misalnya, dalam konteks kebijakan pengentasan kemiskinan, evaluasi eksperimental dapat digunakan untuk mengukur dampak intervensi tertentu terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga miskin (Banerjee & Duflo, 2011). Dengan membandingkan kelompok yang menerima intervensi (kelompok perlakuan) dan kelompok yang tidak menerima intervensi (kelompok kontrol), evaluasi ini memberikan bukti kausal yang kuat mengenai efektivitas kebijakan.

4. Evaluasi hasil retrospektif

Evaluasi hasil retrospektif fokus pada pengukuran dampak kebijakan setelah program selesai dilaksanakan, tanpa kontrol langsung terhadap variabel masukan atau proses (Stufflebeam & Shinkfield, 2007; Vedung, 2010). Evaluasi ini berguna untuk menilai hasil kebijakan dalam konteks sosial dan ekonomi yang lebih luas, seperti penurunan angka kemiskinan atau peningkatan akses layanan pendidikan di wilayah sasaran (Dunn, 2018). Pendekatan ini membantu pembuat kebijakan memahami sejauh mana program memberikan perubahan nyata dan berkelanjutan dalam kehidupan masyarakat, meskipun tidak memungkinkan untuk melakukan intervensi selama pelaksanaan program berlangsung.

5. Evaluasi teoritis

Pendekatan ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan berdasarkan nilai, tujuan, dan target yang ditetapkan oleh pembuat kebijakan, baik yang eksplisit maupun implisit (Dunn, 2018; Vedung, 2010). Evaluasi teoritis melibatkan partisipasi berbagai pihak dalam perumusan tujuan dan target kebijakan, termasuk staf program, administrator, dan kelompok masyarakat (Rossi, Lipsey, & Freeman, 2004). Pendekatan ini membantu mengidentifikasi kesenjangan antara harapan dan realisasi kebijakan, serta memberikan dasar untuk perbaikan kebijakan di masa mendatang (Patton, 2015). Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, evaluasi ini memastikan bahwa kebijakan lebih responsif terhadap kebutuhan dan kondisi nyata di lapangan.

Pendekatan evaluasi kebijakan mencakup berbagai metode yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan program (Dunn, 2018; Vedung, 2010). Evaluasi semu memberikan data dasar yang berguna tetapi cenderung kurang mendalam dalam menganalisis dampak kebijakan (Rossi, Lipsey, & Freeman, 2004). Sebaliknya, evaluasi formal menawarkan analisis yang lebih sistematis terhadap tujuan, pelaksanaan, dan hasil kebijakan (Stufflebeam & Shinkfield, 2007). Dalam konteks program Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), penerapan evaluasi formal yang komprehensif dapat mencakup berbagai tipe evaluasi:

1. Evaluasi Perkembangan (Formative): Memantau pelaksanaan program secara berkelanjutan untuk memberikan umpan balik dan penyesuaian cepat (Patton, 2015).
2. Evaluasi Retrospektif: Menilai dampak kebijakan setelah program selesai, seperti penurunan angka kemiskinan atau peningkatan kesejahteraan penerima (Vedung, 2010).
3. Evaluasi Eksperimental: Menguji hipotesis tentang dampak kebijakan dengan mengontrol variabel tertentu untuk menentukan efektivitas program (Banerjee & Duflo, 2011).
4. Evaluasi Teoritis: Melibatkan penilaian terhadap kesesuaian antara tujuan kebijakan dan realisasi di lapangan (Dunn, 2018).

Pendekatan ini akan memberikan wawasan yang lebih lengkap tentang kinerja program PKH dan BPNT serta dampaknya terhadap pengentasan kemiskinan di Indonesia.

2.2.2. Fungsi Evaluasi Dalam Kebijakan Publik

Evaluasi kebijakan memiliki beberapa fungsi utama dalam analisis kebijakan publik. Dunn (2003) mengemukakan bahwa salah satu fungsi utamanya adalah menyediakan informasi yang akurat dan terpercaya mengenai pelaksanaan kebijakan, termasuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi juga memberikan dasar untuk menilai dan mengkritisi nilai-nilai yang mendasari tujuan dan sasaran kebijakan. Selain itu, evaluasi mendukung penerapan metode analisis kebijakan lainnya, seperti perumusan masalah dan pengembangan rekomendasi kebijakan (Rossi, Lipsey, & Freeman, 2004). Dengan demikian, evaluasi kebijakan berperan penting dalam memastikan kebijakan publik tidak hanya efektif, tetapi juga relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Vedung, 2010).

Dalam pelaksanaan program seperti PKH dan BPNT, evaluasi diperlukan untuk memastikan bahwa tujuan pengentasan kemiskinan tercapai dengan penggunaan sumber daya yang efisien dan efektif. Berdasarkan penelitian Yanti K.N.N (2022), evaluasi kebijakan melibatkan proses interpretasi, penilaian, dan analisis, yang bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas mengenai hasil kebijakan. Evaluasi ini juga harus mempertimbangkan nilai-nilai yang mendasari kebijakan serta sasaran yang ingin dicapai.

Dunn (2003) menawarkan enam kriteria evaluasi kebijakan, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan kelayakan. Efektivitas mengukur sejauh mana suatu kebijakan mencapai

tujuan yang diinginkan, sering kali diukur melalui indikator kuantitatif seperti produk, layanan, atau nilai ekonomi yang dihasilkan. Efisiensi, di sisi lain, mengacu pada penggunaan sumber daya yang optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan, dengan mengukur rasio antara input dan output dalam konteks kebijakan.

Kecukupan mengacu pada sejauh mana kebijakan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai dimensi. Dunn (2018) menjelaskan bahwa kecukupan berhubungan erat dengan efektivitas, karena keberhasilan kebijakan tidak hanya diukur dari hasilnya, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu mengatasi masalah yang dihadapi.

Pemerataan merujuk pada distribusi manfaat dan beban kebijakan secara adil di antara berbagai kelompok masyarakat, dengan mempertimbangkan prinsip keadilan sosial dan hukum (Rossi, Lipsey, & Freeman, 2004). Kebijakan yang adil memastikan bahwa kelompok yang rentan atau kurang mampu mendapatkan manfaat yang setara dengan kelompok lain dalam masyarakat.

Responsivitas, di sisi lain, mengukur sejauh mana kebijakan mampu memenuhi kebutuhan, harapan, dan preferensi masyarakat penerima manfaat (Vedung, 2010). Kebijakan yang responsif bersifat adaptif terhadap umpan balik dari masyarakat dan mampu menyesuaikan implementasinya untuk memastikan kepuasan penerima manfaat dan efektivitas tujuan kebijakan. Dunn (2003) juga menambahkan bahwa akurasi merupakan kriteria penting yang berhubungan dengan keandalan

asumsi yang mendasari kebijakan. Akurasi digunakan untuk mengevaluasi seberapa baik suatu kebijakan atau alternatif yang diusulkan dapat mencapai hasil yang diharapkan.

Evaluasi kebijakan memiliki berbagai fungsi yang sangat penting dalam siklus kebijakan publik. Dunn (2003) menyatakan bahwa evaluasi berperan dalam menyediakan informasi yang relevan dan terpercaya terkait kinerja kebijakan. Informasi ini mencakup sejauh mana tujuan telah tercapai, serta nilai-nilai dan peluang yang dapat diraih melalui kebijakan tersebut.

Dalam program Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), evaluasi memberikan gambaran sejauh mana bantuan yang diberikan mampu meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat serta menurunkan tingkat kemiskinan secara signifikan. Evaluasi ini membantu mengidentifikasi keberhasilan, hambatan, serta area yang memerlukan perbaikan, sehingga kebijakan dapat disempurnakan untuk mencapai efektivitas yang lebih baik di masa mendatang (Rossi, Lipsey, & Freeman, 2004; Vedung, 2010).

Selain itu, evaluasi berfungsi sebagai mekanisme untuk mengkritisi nilai-nilai yang mendasari tujuan kebijakan (Dunn, 2018; Vedung, 2010). Ini berarti bahwa evaluasi juga menjadi alat untuk menilai apakah kebijakan yang diambil sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan sosial, efisiensi anggaran, dan tanggung jawab publik (Rossi, Lipsey, & Freeman, 2004). Fungsi ini sangat penting dalam kebijakan pengentasan kemiskinan, karena tujuan utama dari kebijakan tersebut adalah

menciptakan dampak sosial yang luas dengan memanfaatkan sumber daya yang terbatas (Patton, 2015). Evaluasi yang menyeluruh memastikan bahwa kebijakan tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga etis dan adil bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok yang paling membutuhkan.

2.2.3. Model-Model dalam Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan mencakup berbagai pendekatan yang dirancang untuk menilai proses, hasil, dan dampak kebijakan. Menurut Wirawan (2012:80), terdapat beberapa model evaluasi program yang digunakan dalam konteks kebijakan publik:

1. Model evaluasi formatif

Evaluasi formatif berfokus pada peningkatan dan perbaikan program selama proses pelaksanaan (Patton, 2015; Stufflebeam & Shinkfield, 2007). Pendekatan ini digunakan untuk memberikan umpan balik secara berkelanjutan sehingga pelaksanaan program dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kendala di lapangan. Misalnya, dalam program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), evaluasi formatif dapat membantu mengidentifikasi kendala distribusi bahan pangan di wilayah terpencil dan memberikan solusi untuk memperbaiki mekanisme tersebut (Kementerian Sosial RI, 2021). Dengan adanya evaluasi formatif, program dapat berjalan lebih efektif dan efisien serta lebih responsif terhadap kondisi nyata di lapangan.

2. Model evaluasi sumatif

Evaluasi sumatif dilakukan setelah program selesai untuk menilai sejauh mana tujuan program tercapai (Stufflebeam & Shinkfield, 2007; Rossi, Lipsey, & Freeman, 2004). Model ini berfokus pada dampak keseluruhan program terhadap kelompok sasaran dan memberikan gambaran menyeluruh tentang efektivitas kebijakan. Contohnya, evaluasi sumatif pada Program Keluarga Harapan (PKH) dapat mengukur keberhasilan program dalam meningkatkan tingkat partisipasi pendidikan anak-anak dari keluarga miskin (Kementerian Sosial RI, 2021). Dengan pendekatan ini, pembuat kebijakan dapat melihat apakah intervensi yang diberikan telah berhasil mencapai tujuan utamanya dan menentukan apakah program tersebut layak untuk dilanjutkan, dimodifikasi, atau dihentikan.

3. Model evaluasi proses

Model ini menelusuri langkah-langkah yang diambil selama implementasi program. Evaluasi proses melibatkan pengumpulan informasi tentang bagaimana program dilaksanakan, apakah sesuai dengan rencana awal, dan tantangan apa saja yang muncul (Patton, 2015; Rossi, Lipsey, & Freeman, 2004). Sebagai contoh, evaluasi proses dapat menilai apakah dana bantuan sosial telah disalurkan tepat waktu dan sesuai sasaran, serta mengidentifikasi kendala teknis dalam distribusi bantuan.

4. Model evaluasi hasil

Berfokus pada dampak dan hasil akhir dari program. Model ini mengevaluasi perubahan yang terjadi sebagai akibat dari pelaksanaan kebijakan dan memberikan gambaran tentang efektivitas program

(Vedung, 2010; Stufflebeam & Shinkfield, 2007). Misalnya, evaluasi hasil pada Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dapat mengukur sejauh mana bantuan pangan telah meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan keluarga penerima manfaat. Dengan model ini, pembuat kebijakan dapat menentukan keberhasilan program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

5. Model evaluasi berbasis teori

Pendekatan ini menggunakan kerangka teori untuk mengevaluasi program. Asumsi yang mendasari program diuji terhadap hasil yang dicapai untuk melihat sejauh mana teori yang digunakan sesuai dengan kenyataan di lapangan (Rossi, Lipsey, & Freeman, 2004; Vedung, 2010). Dalam konteks Program Keluarga Harapan (PKH), evaluasi berbasis teori dapat mengkaji apakah asumsi bahwa bantuan tunai bersyarat dapat meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan terbukti secara empiris (Dunn, 2018). Evaluasi ini membantu memastikan bahwa kebijakan dirancang berdasarkan logika yang valid dan memberikan wawasan tentang aspek-aspek kebijakan yang memerlukan penyesuaian agar lebih efektif.

2.2.4. Evaluasi dalam Siklus Kebijakan Publik

Dalam siklus kebijakan, evaluasi kebijakan sering dianggap sebagai tahap akhir setelah kebijakan diterapkan (Dunn, 2018). Namun, pendekatan modern menekankan bahwa evaluasi harus dilakukan sepanjang siklus kebijakan, termasuk pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pasca-implementasi (Patton, 2015; Stufflebeam &

Shinkfield, 2007). Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan tetap relevan, efektif, dan adaptif terhadap perubahan kondisi di lapangan. Evaluasi pada tahap perencanaan membantu memastikan bahwa tujuan kebijakan jelas dan realistis. Evaluasi selama pelaksanaan (evaluasi formatif) memberikan umpan balik untuk perbaikan kebijakan secara berkelanjutan. Sementara itu, evaluasi pada tahap pasca-implementasi (evaluasi sumatif) mengukur efektivitas kebijakan dan dampak jangka panjangnya. Dengan pendekatan ini, kebijakan dapat lebih responsif dan mampu menjawab tantangan serta kebutuhan masyarakat secara dinamis.

1. Perencanaan:

Evaluasi dilakukan untuk menilai apakah perumusan kebijakan telah didasarkan pada identifikasi masalah yang akurat dan relevan. Evaluasi pada tahap ini memastikan bahwa tujuan kebijakan dirumuskan dengan jelas, berdasarkan bukti dan kebutuhan masyarakat (Dunn, 2018).

2. Pelaksanaan:

Evaluasi pada tahap pelaksanaan menilai sejauh mana program dijalankan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Evaluasi ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kendala operasional yang dihadapi di lapangan dan mencari solusi untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan (Patton, 2015; Rossi, Lipsey, & Freeman, 2004).

3. Pasca-Implementasi:

Evaluasi pada tahap ini berfokus pada dampak kebijakan setelah

program selesai dilaksanakan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur keberhasilan kebijakan dalam mencapai tujuan akhir serta mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan untuk kebijakan serupa di masa mendatang (Vedung, 2010; Stufflebeam & Shinkfield, 2007).

Dengan melakukan evaluasi pada setiap tahap siklus kebijakan, pembuat kebijakan dapat memastikan bahwa kebijakan tetap relevan, efektif, dan responsif terhadap dinamika serta kebutuhan masyarakat.

2.2.5. Langkah-Langkah Evaluasi Kebijakan

Menurut **Lester dan Stewart**, evaluasi kebijakan terdiri dari dua tugas utama:

1. Mengidentifikasi dampak kebijakan: Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana kebijakan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jika tujuan tidak tercapai, evaluasi dapat membantu mengidentifikasi penyebab kegagalan, seperti kesalahan dalam perencanaan, implementasi, atau hambatan operasional (Lester & Stewart, 2000). Analisis dampak ini memberikan wawasan penting bagi pembuat kebijakan untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian yang diperlukan.
2. Menilai keberhasilan atau kegagalan kebijakan: Penilaian ini dilakukan dengan menggunakan standar atau kriteria yang telah ditentukan sebelumnya, seperti efektivitas (sejauh mana tujuan tercapai), efisiensi (penggunaan sumber daya secara optimal), dan pemerataan (keadilan distribusi manfaat kebijakan) (Lester &

Stewart, 2000). Penilaian ini memungkinkan pembuat kebijakan untuk menentukan apakah suatu kebijakan layak dipertahankan, diubah, atau dihentikan.

Dengan dua tugas utama ini, evaluasi kebijakan menjadi alat penting untuk memastikan kebijakan publik dapat menghasilkan dampak positif yang diharapkan serta beradaptasi terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

2.2.6. Dimensi Evaluasi Kebijakan Sosial William N. Dunn

Dunn (2003) mengemukakan lima dimensi utama evaluasi kebijakan yang dapat digunakan sebagai kerangka kerja analisis:

1. Efektivitas

Efektivitas menilai sejauh mana kebijakan mencapai tujuan yang diharapkan (Dunn, 2018; Rossi, Lipsey, & Freeman, 2004). Dalam konteks kebijakan publik, efektivitas tidak hanya mencakup hasil langsung tetapi juga dampak jangka panjang yang dihasilkan dari implementasi kebijakan tersebut. Pada program Program Keluarga Harapan (PKH), efektivitas dapat diukur melalui perubahan signifikan dalam tingkat kesejahteraan rumah tangga penerima manfaat. Indikator efektivitas dapat mencakup peningkatan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin, peningkatan kunjungan ke fasilitas kesehatan, serta perbaikan kondisi ekonomi dan sosial penerima manfaat (Kementerian Sosial RI, 2021). Dengan memahami efektivitas kebijakan, pembuat kebijakan dapat memastikan bahwa program yang dirancang benar-benar memberikan dampak positif yang diharapkan bagi masyarakat sasaran.

2. Efisiensi

Efisiensi mengacu pada penggunaan sumber daya yang optimal untuk mencapai tujuan kebijakan (Dunn, 2018; Rossi, Lipsey, & Freeman, 2004). Penilaian efisiensi melibatkan analisis terhadap biaya dan manfaat kebijakan, dengan tujuan memastikan bahwa sumber daya yang digunakan menghasilkan manfaat sebesar mungkin bagi masyarakat. Dalam kasus Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), efisiensi dapat diukur melalui perbandingan antara biaya operasional program dengan manfaat yang dirasakan oleh penerima manfaat. Misalnya, peningkatan akses terhadap bahan pangan berkualitas dan beragam dengan biaya distribusi yang minimal menunjukkan efisiensi yang baik (Kementerian Sosial RI, 2021). Evaluasi efisiensi ini membantu memastikan bahwa dana publik dimanfaatkan secara efektif untuk memberikan dampak yang maksimal.

3. Kecukupan

Kecukupan mengevaluasi apakah hasil kebijakan cukup untuk mengatasi permasalahan yang menjadi target (Dunn, 2018; Rossi, Lipsey, & Freeman, 2004). Dimensi ini menilai sejauh mana kebijakan mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang menjadi sasaran serta memberikan solusi yang memadai untuk permasalahan yang dihadapi. Dalam konteks Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), kecukupan dapat dilihat dari sejauh mana bantuan tersebut mengurangi kesenjangan sosial dan memperbaiki kualitas hidup penerima manfaat (Kementerian Sosial RI, 2021). Misalnya, apakah bantuan yang diberikan dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan,

dan pangan secara berkelanjutan bagi keluarga miskin. Evaluasi kecukupan membantu memastikan bahwa kebijakan tidak hanya sekadar berjalan, tetapi juga mampu memberikan solusi yang komprehensif dan berdampak positif secara nyata.

4. Pemerataan

Pemerataan menilai keadilan dalam distribusi manfaat dan beban kebijakan (Dunn, 2018; Rossi, Lipsey, & Freeman, 2004). Fokus utama dari dimensi ini adalah ketepatan sasaran penerima manfaat, yaitu memastikan bahwa kebijakan benar-benar menjangkau kelompok yang paling membutuhkan. Dimensi pemerataan sangat relevan untuk kebijakan pengentasan kemiskinan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Program-program ini bertujuan untuk memastikan bahwa manfaat dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat miskin, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan (Kementerian Sosial RI, 2021). Evaluasi pemerataan membantu mengidentifikasi apakah terdapat ketimpangan dalam penyaluran bantuan, serta memastikan tidak ada kelompok yang terpinggirkan dalam implementasi kebijakan tersebut.

5. Responsivitas

Responsivitas mencerminkan sejauh mana kebijakan publik merespons kebutuhan dan preferensi masyarakat penerima manfaat (Dunn, 2018; Vedung, 2010). Kebijakan yang responsif harus mampu mendengar, memahami, dan menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi dan tuntutan di lapangan. Dalam program Program Keluarga Harapan

(PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), penilaian responsivitas dapat dilakukan dengan mengevaluasi mekanisme distribusi bantuan, kualitas pelayanan, serta fleksibilitas program dalam menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat yang dinamis (Kementerian Sosial RI, 2021). Misalnya, ketika terjadi kendala dalam distribusi bantuan di wilayah terpencil, program yang responsif akan segera melakukan penyesuaian untuk memastikan bantuan tetap tepat waktu dan tepat sasaran. Dengan demikian, responsivitas memastikan bahwa kebijakan tetap relevan dan efektif dalam memenuhi harapan serta kebutuhan penerima manfaat.

2.2.7. Relevansi Model Evaluasi Dalam Konteks PKH dan BPNT

Dalam penelitian ini, model evaluasi formatif dan sumatif menjadi kerangka utama untuk menganalisis kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Model formatif digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan program secara real-time, dengan tujuan memberikan umpan balik yang memungkinkan perbaikan dan penyesuaian selama implementasi berlangsung (Patton, 2015; Stufflebeam & Shinkfield, 2007). Sementara itu, model sumatif digunakan untuk menilai keberhasilan program setelah implementasi selesai. Evaluasi ini berfokus pada pengukuran sejauh mana tujuan kebijakan telah tercapai dan dampak yang dihasilkan bagi penerima manfaat (Rossi, Lipsey, & Freeman, 2004; Vedung, 2010). Dengan menggabungkan kedua model ini, evaluasi dapat memberikan gambaran yang menyeluruh tentang pelaksanaan dan dampak program. Evaluasi formatif memastikan kebijakan tetap efektif selama proses berjalan, sementara evaluasi sumatif

memberikan analisis komprehensif tentang hasil akhir dan efektivitas kebijakan dalam jangka panjang.

Model evaluasi kebijakan, seperti formatif, sumatif, proses, hasil, dan berbasis teori, memberikan pendekatan yang beragam untuk menilai efektivitas dan efisiensi kebijakan (Dunn, 2018; Rossi, Lipsey, & Freeman, 2004). Setiap model memiliki fokus yang berbeda:

Evaluasi Formatif menilai pelaksanaan program secara real-time untuk memberikan umpan balik dan perbaikan selama proses berlangsung (Patton, 2015). Evaluasi Sumatif menilai keberhasilan program setelah implementasi selesai, dengan berfokus pada pencapaian tujuan kebijakan (Stufflebeam & Shinkfield, 2007). Evaluasi Proses mengevaluasi bagaimana program dilaksanakan dan mengidentifikasi kendala operasional (Vedung, 2010). Evaluasi Hasil mengukur perubahan atau dampak yang dihasilkan dari kebijakan (Rossi, Lipsey, & Freeman, 2004). Evaluasi Berbasis Teori menguji asumsi yang mendasari kebijakan dan melihat kesesuaian antara teori dan praktik di lapangan (Dunn, 2018).

Dalam konteks program PKH dan BPNT, penerapan berbagai model evaluasi ini dapat membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan program, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa depan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan berfungsi sebagai alat strategis untuk memastikan bahwa kebijakan publik memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat, terutama dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan.

Pengentasan Kemiskinan

Konsep Kemiskinan

Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kondisi ketika individu atau kelompok tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup layak (Sen, 1999; Todaro & Smith, 2012). Kebutuhan dasar tersebut meliputi akses terhadap pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial lainnya. Dalam konteks kebijakan publik, kemiskinan sering diukur menggunakan berbagai indikator seperti pendapatan per kapita, tingkat pendidikan, status kesehatan, serta akses terhadap infrastruktur dan layanan dasar (BPS, 2021). Memahami kemiskinan secara komprehensif memungkinkan pembuat kebijakan untuk merancang program yang lebih efektif, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan mengurangi kesenjangan sosial.

Dalam literatur, kemiskinan diuraikan ke dalam berbagai dimensi berikut:

1. Kebutuhan dasar: Kebutuhan dasar meliputi akses terhadap makanan, tempat tinggal, pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur publik (Todaro & Smith, 2012). Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan ini mengakibatkan individu atau kelompok kehilangan hak untuk hidup bermartabat. Pemenuhan kebutuhan dasar menjadi indikator penting dalam mengukur tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup (BPS, 2021).
2. Konsep kapabilitas: Amartya Sen (1999) memperkenalkan konsep kapabilitas untuk melihat kemiskinan dari perspektif yang lebih luas.

Ia menyatakan bahwa kemiskinan bukan hanya soal rendahnya pendapatan, tetapi juga kurangnya kemampuan seseorang untuk mencapai tujuan hidup dan menjalani kehidupan yang bermakna. Misalnya, kurangnya akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan dapat membatasi peluang individu untuk berkembang dan meningkatkan kesejahteraannya.

3. **Multidimensi:** Kemiskinan sering dipandang sebagai fenomena multidimensi yang mencakup berbagai aspek kehidupan. Menurut UNDP dan World Bank, aspek-aspek yang terkait dengan kemiskinan meliputi: Aspek sosial: Ketidaksetaraan dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan, yang memperparah kesenjangan sosial (UNDP, 2019). Akses terhadap layanan dasar: Ketidakmampuan untuk mendapatkan layanan publik yang mendukung kehidupan layak, seperti transportasi, air bersih, dan energi (World Bank, 2020).

Pemahaman terhadap berbagai dimensi kemiskinan membantu pembuat kebijakan merancang intervensi yang lebih efektif, komprehensif, dan berkelanjutan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Konsep-konsep ini menjadi dasar dalam perumusan kebijakan pengentasan kemiskinan. Memahami kemiskinan sebagai fenomena yang lebih dari sekadar rendahnya pendapatan membantu menciptakan solusi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan (Sen, 1999; UNDP, 2019). Dengan memperhitungkan dimensi seperti kebutuhan dasar, kapabilitas, dan multidimensi, kebijakan dapat dirancang untuk tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat miskin tetapi juga memperluas akses terhadap

pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya (Todaro & Smith, 2012). Pendekatan ini memastikan kebijakan pengentasan kemiskinan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan mengurangi kesenjangan sosial baik di perkotaan maupun di pedesaan. Dengan demikian, kebijakan tersebut tidak hanya fokus pada pemenuhan kebutuhan material tetapi juga meningkatkan kemampuan individu untuk menjalani kehidupan yang bermakna dan produktif.

Strategi Pengentasan Kemiskinan

Pengentasan kemiskinan memerlukan pendekatan berbasis teori yang menjawab berbagai aspek kemiskinan. Berikut adalah beberapa teori utama yang relevan:

1. Teori Kapabilitas (Amartya Sen, 1999): Teori ini berfokus pada kemampuan individu untuk mencapai potensi hidupnya secara penuh. Menurut Sen, kemiskinan bukan hanya masalah rendahnya pendapatan, tetapi juga keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kebebasan untuk memilih kehidupan yang diinginkan. Kebijakan pengentasan kemiskinan yang berbasis kapabilitas menekankan pada peningkatan kemampuan dasar masyarakat untuk menjalani kehidupan yang bermakna.
2. Teori Kebutuhan Dasar (Basic Needs Theory): Teori ini menekankan bahwa pengentasan kemiskinan harus dimulai dengan pemenuhan

kebutuhan dasar, seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur publik (Todaro & Smith, 2012). Kebijakan berbasis teori ini dirancang untuk memastikan bahwa masyarakat miskin memiliki akses ke kebutuhan yang esensial untuk hidup layak.

3. Teori Siklus Kemiskinan (Cycle of Poverty): Teori ini menyatakan bahwa kemiskinan bersifat turun-temurun dan terperangkap dalam siklus yang sulit diputus. Faktor-faktor seperti rendahnya pendidikan, kesehatan yang buruk, dan keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi memperparah kondisi ini (Lewis, 1966). Intervensi kebijakan yang efektif harus dirancang untuk memutus siklus ini dengan memberikan akses ke pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.
4. Teori Ketergantungan (Dependency Theory): Teori ini menyoroti bahwa kemiskinan di negara berkembang sering disebabkan oleh struktur ekonomi global yang tidak adil dan dominasi negara maju (Frank, 1966). Kebijakan pengentasan kemiskinan berdasarkan teori ini mendorong kemandirian ekonomi, pembangunan lokal, dan penguatan kapasitas masyarakat untuk mengurangi ketergantungan.
5. Teori Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Theory): Menurut teori ini, pengentasan kemiskinan harus dilakukan dengan mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi (Brundtland Report, 1987). Kebijakan harus memastikan

pemenuhan kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya.

Dengan menggunakan pendekatan berbasis teori ini, kebijakan pengentasan kemiskinan dapat dirancang secara komprehensif, berbasis bukti, dan berkelanjutan, sehingga mampu menjawab berbagai aspek kemiskinan yang kompleks.

Pengentasan Kemiskinan di Indonesia

Di Indonesia, pemerintah telah meluncurkan berbagai inisiatif dan program untuk mengatasi masalah kemiskinan. Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) adalah contoh nyata dari upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial kepada kelompok yang rentan (Kementerian Sosial RI, 2021). PKH adalah program bantuan tunai bersyarat yang bertujuan untuk meningkatkan akses keluarga miskin terhadap pendidikan dan kesehatan. Bantuan ini diberikan kepada keluarga yang memiliki ibu hamil, balita, anak usia sekolah, penyandang disabilitas, atau lansia. Syarat-syarat tertentu, seperti memastikan anak bersekolah atau memeriksakan kesehatan rutin, mendorong penerima manfaat untuk meningkatkan kualitas hidup mereka (TNP2K, 2020). BPNT adalah program bantuan sosial yang memberikan akses kepada keluarga miskin untuk memperoleh bahan pangan berkualitas melalui mekanisme non-tunai. Bantuan ini disalurkan dalam bentuk saldo elektronik yang dapat digunakan untuk membeli bahan pangan pokok di e-warung (elektronik warung gotong-royong) yang telah ditentukan (Kementerian Sosial RI, 2021). Kedua program ini bertujuan

untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memastikan bahwa bantuan tepat sasaran dan dapat memenuhi kebutuhan dasar penerima manfaat. Dengan kombinasi bantuan tunai dan non-tunai, kebijakan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif secara ekonomi dan sosial bagi keluarga miskin di Indonesia.

PKH merupakan program perlindungan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga yang kurang mampu melalui bantuan tunai bersyarat. Berikut adalah beberapa aspek penting mengenai PKH: Bantuan tunai bersyarat: Keluarga penerima manfaat (KPM) memperoleh bantuan tunai yang bersyarat, yang diberikan berdasarkan pemenuhan kriteria tertentu, seperti anak yang sedang bersekolah, ibu hamil, atau balita yang rutin menjalani pemeriksaan kesehatan. Fokus pada Pendidikan dan Kesehatan: Selain memberikan bantuan keuangan, program ini juga bertujuan untuk mendorong perbaikan dalam bidang pendidikan dan kesehatan, yang diharapkan dapat mengurangi siklus kemiskinan jangka panjang. Target pada Keluarga Miskin: PKH diperuntukkan bagi keluarga miskin yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sehingga bantuan yang diberikan dapat tepat sasaran.

BPNT adalah program yang dirancang untuk menggantikan Bantuan Sosial Pangan (BSP), dengan tujuan memberikan akses kepada keluarga miskin terhadap pangan yang bergizi. Berikut adalah ciri-ciri utama dari BPNT: Bantuan non tunai: Keluarga yang berhak menerima manfaat akan mendapatkan bantuan dalam bentuk kartu yang dapat

digunakan untuk membeli bahan pangan di tempat yang telah ditentukan (e-warong). Diversifikasi pangan: Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses ke berbagai jenis bahan pangan, sehingga dapat memperbaiki kualitas gizi keluarga yang kurang mampu. Mendorong kemandirian: Selain itu, program ini berupaya memberdayakan masyarakat dengan mendorong partisipasi dalam pengelolaan program serta pengembangan pasar lokal.

Kedua program tersebut merupakan bagian integral dari strategi pemerintah dalam menghadapi tantangan kemiskinan di Indonesia, dengan pendekatan berbasis perlindungan sosial. Dengan memberikan bantuan yang terarah dan bersyarat, diharapkan program ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menurunkan angka kemiskinan, dan mendukung pembangunan sosial yang berkelanjutan.

Kebijakan Bantuan Sosial PKH dan BPNT

Kebijakan Bantuan Sosial

Untuk mengatasi kesenjangan ekonomi, pemerintah Indonesia telah merumuskan kebijakan pemberian bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat. Bantuan sosial didefinisikan sebagai pemberian dukungan berupa uang atau barang dari pemerintah pusat atau daerah kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat secara tidak berkesinambungan dan selektif (Kementerian Sosial RI, 2021). Tujuan dari bantuan ini adalah untuk melindungi penerima dari risiko sosial yang

mungkin timbul, seperti kemiskinan, keterlantaran, disabilitas, atau dampak bencana. Contoh program bansos antara lain PKH dan BPNT, yang dirancang untuk memberikan perlindungan sosial kepada kelompok rentan dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin (TNP2K, 2020). Melalui kebijakan ini, pemerintah berupaya mengurangi kesenjangan ekonomi dan memastikan bahwa bantuan tepat sasaran, sehingga kelompok yang paling membutuhkan dapat merasakan manfaat dari dukungan tersebut. Bantuan sosial juga diharapkan menjadi instrumen untuk meningkatkan akses pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan bagi masyarakat kurang mampu.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 mengenai Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga, bantuan sosial adalah pengeluaran yang berupa transfer uang, barang, atau jasa yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak mampu. Tujuan dari pemberian bantuan sosial ini adalah untuk melindungi masyarakat dari risiko sosial sekaligus meningkatkan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Program bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat Indonesia mencakup berbagai inisiatif, antara lain:

1. Program Indonesia Pintar (PIP): Bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin.
2. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS): Memberikan perlindungan kesehatan universal melalui akses layanan kesehatan yang terjangkau.

3. Program Keluarga Harapan (PKH): Bantuan tunai bersyarat yang mendorong peningkatan kesejahteraan melalui akses pendidikan dan kesehatan.
4. Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT): Memberikan akses terhadap bahan pangan berkualitas melalui mekanisme non-tunai.

Keberadaan program-program bantuan sosial mencerminkan komitmen pemerintah dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi di Indonesia. Dengan pendekatan yang terstruktur dan terukur, kebijakan bansos diharapkan mampu menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan berdaya (Kementerian Sosial RI, 2021). Bukti dari keberhasilan program ini terlihat dari beberapa indikator sosial-ekonomi:

1. Penurunan Angka Kemiskinan: Angka kemiskinan menurun dari 11,22% pada tahun 2015 menjadi 9,82% pada tahun 2018 (BPS, 2019).
2. Perbaikan Rasio Gini: Rasio Gini, yang mengukur tingkat ketimpangan pendapatan, menunjukkan perbaikan dengan penurunan dari 0,408 pada tahun 2015 menjadi 0,389 pada tahun 2018 (BPS, 2019).
3. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM): IPM meningkat dari 68,90 pada tahun 2014 menjadi 70,81 pada tahun 2017 (BPS, 2018).

Data ini menunjukkan bahwa kebijakan bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai

(BPNT), berkontribusi positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan mendorong pembangunan manusia secara berkelanjutan.

Sejarah dan Perkembangan PKH BPNT

Program Keluarga Harapan (PKH) diluncurkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2007 sebagai salah satu bentuk bantuan sosial bersyarat (Kementerian Sosial RI, 2021). Tujuan utama dari PKH adalah untuk memutus rantai kemiskinan antar-generasi dengan memberikan bantuan tunai kepada keluarga miskin yang memiliki kebutuhan di bidang kesehatan dan pendidikan. Bantuan ini diberikan dengan syarat bahwa keluarga penerima memenuhi kewajiban tertentu, seperti: Memastikan anak-anak mereka bersekolah secara teratur, membawa anak balita dan ibu hamil untuk mendapatkan akses perawatan kesehatan yang diperlukan, seperti imunisasi dan pemeriksaan kehamilan dan memastikan penyandang disabilitas dan lanjut usia dalam keluarga mendapatkan perawatan yang layak. Dengan skema ini, PKH bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mendorong perubahan perilaku positif, dan memastikan keluarga miskin memiliki akses terhadap layanan dasar. PKH juga diharapkan mampu mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan, sehingga keluarga penerima dapat keluar dari lingkaran kemiskinan.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah inisiatif bantuan sosial bersyarat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

dengan mendorong partisipasi aktif keluarga penerima manfaat (KPM) dalam menjaga kesehatan dan memastikan anak-anak mereka bersekolah. Sejak diluncurkan, jumlah keluarga penerima manfaat PKH terus mengalami peningkatan signifikan, yaitu: 2,8 juta KPM pada tahun 2014, 6 juta KPM pada tahun 2016 dan 10 juta KPM pada tahun 2018. Setiap KPM menerima bantuan sosial sebesar Rp 1.890.000 per tahun (Kementerian Sosial RI, 2021). Program ini diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan antar-generasi dengan memastikan keluarga miskin memiliki akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan yang lebih baik.

Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) adalah transformasi dari subsidi Beras Sejahtera (Rastra) yang dimulai pada tahun 2017 dan diperuntukkan bagi 1,2 juta KPM. Program ini direncanakan untuk diperluas secara bertahap hingga mencapai 15,5 juta KPM pada tahun 2019 (TNP2K, 2020). BPNT dirancang untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga miskin dengan cara yang lebih efisien dan tepat sasaran. BPNT menggantikan sistem sebelumnya, yaitu beras untuk rakyat miskin (Raskin), dan kini memberikan bantuan dalam bentuk voucher atau kartu elektronik. Bantuan ini dapat digunakan untuk membeli bahan pangan di e-warung (warung elektronik) yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Setiap KPM menerima BPNT sebesar Rp 110.000 per bulan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), yang dapat dibelanjakan untuk membeli beras dan/atau telur.

Melalui PKH dan BPNT, pemerintah berkomitmen untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan sosial, dan meningkatkan ketahanan pangan bagi masyarakat miskin

secara lebih efektif dan berkelanjutan. Program ini diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran KPM dengan memenuhi sebagian kebutuhan pangan mereka, menyediakan bahan pangan yang lebih bergizi, dan memastikan distribusi yang tepat sasaran dan tepat waktu. Selain itu, BPNT memberikan lebih banyak pilihan bagi KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan mereka dan mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sementara itu, Bansos Rastra memberikan beras kualitas medium sebanyak 10 kg per KPM setiap bulan.

Tujuan dan Sasaran PKH BPNT

Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) ditujukan kepada keluarga miskin yang memenuhi kriteria tertentu, seperti memiliki anak usia sekolah, ibu hamil, atau lansia. Tujuan utama dari kedua program ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia (Kementerian Sosial RI, 2021). Di Sulawesi Barat, jumlah penerima PKH dan BPNT cukup signifikan, mencakup berbagai lapisan masyarakat miskin baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Namun, efektivitas program-program ini dalam menurunkan angka kemiskinan masih menjadi pertanyaan penting yang memerlukan evaluasi lebih mendalam. Faktor seperti ketepatan sasaran penerima, distribusi bantuan, dan pemanfaatan bantuan oleh keluarga penerima manfaat perlu dianalisis secara menyeluruh.

Dengan pengalokasian anggaran yang besar untuk kedua program tersebut, diperlukan analisis dampak yang komprehensif terhadap kesejahteraan para penerima manfaat. Evaluasi ini mencakup sejauh mana

program PKH dan BPNT berhasil: Meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan bagi keluarga miskin, memperbaiki ketahanan pangan keluarga penerima BPNT dan mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.

Hasil evaluasi diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan, memastikan efektivitas program, dan memaksimalkan dampak positif dari intervensi sosial di Sulawesi Barat.

Program PKH dan BPNT di Sulawesi Barat

Sulawesi Barat memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Evaluasi program PKH dan BPNT menjadi sangat penting untuk memahami sejauh mana kebijakan ini mampu mengurangi angka kemiskinan di wilayah tersebut.

1. Capaian dan tantangan PKH

Di Sulawesi Barat, PKH telah membantu meningkatkan partisipasi pendidikan dan kesehatan di kalangan keluarga miskin. Namun, tantangan seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang kewajiban penerima manfaat dan distribusi bantuan yang tidak merata masih menjadi hambatan utama.

2. Efektivitas BPNT di wilayah terpencil

BPNT menghadapi tantangan geografis di Sulawesi Barat, terutama terkait distribusi bahan pangan ke daerah terpencil. Infrastruktur yang terbatas sering kali menyebabkan keterlambatan dalam penyediaan

bantuan. Meski demikian, program ini memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan akses pangan bagi keluarga miskin.

Di Sulawesi Barat, tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Sulawesi menjadikan wilayah ini sebagai area yang perlu mendapat perhatian khusus dalam upaya pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, evaluasi terhadap program-program yang diterapkan untuk mengatasi masalah ini sangat penting. Melalui evaluasi tersebut, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai efektivitas kebijakan dalam mengurangi angka kemiskinan di daerah ini.

Evaluasi program akan membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap pencapaian atau kegagalan kebijakan, serta memberikan rekomendasi yang berbasis data untuk perbaikan di masa depan. Dengan demikian, hasil evaluasi dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan langkah-langkah yang lebih efektif dan tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat.

Pentingnya Evaluasi Kebijakan PKH dan BPNT

Evaluasi program pengentasan kemiskinan seperti diperlukan untuk:

1. Mengidentifikasi faktor keberhasilan: Evaluasi membantu memahami elemen kebijakan yang berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Mengatasi hambatan: Evaluasi mengungkap kendala yang dihadapi selama pelaksanaan program, seperti masalah data, distribusi, dan penerimaan masyarakat.
3. Memberikan rekomendasi berbasis data: Hasil evaluasi dapat digunakan untuk memperbaiki desain program, memastikan alokasi anggaran lebih efisien, dan meningkatkan dampak program terhadap kelompok sasaran.

Melalui pendekatan ini, diharapkan program-program yang ada dapat lebih efektif dalam mengurangi angka kemiskinan, khususnya di Sulawesi Barat, yang memiliki karakteristik sosial dan geografis yang unik.

Penelitian Terdahulu

Berikut adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan evaluasi kebijakan bantuan sosial PKH dan BPNT menggunakan pendekatan 5 Dimensi Evaluasi Kebijakan William Dunn:

“Penelitian oleh Kementerian Sosial RI (2022) judul evaluasi program keluarga harapan (PKH) sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Metode yang digunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif menggunakan data anggaran PKH dan tingkat kemiskinan nasional. Survei dilakukan terhadap penerima manfaat untuk mengukur dimensi efektivitas, kecukupan, pemerataan, dan responsivitas dengan skala Likert. Wawancara mendalam digunakan untuk mengidentifikasi kendala implementasi. Hasilnya efisiensi: Alokasi anggaran PKH menunjukkan korelasi positif dengan penurunan angka

kemiskinan sebesar 1,5% dalam lima tahun terakhir. Efektivitas: 80% responden merasa bahwa PKH berhasil meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan anak-anak mereka. Kecukupan: Sebagian besar penerima manfaat menilai besaran bantuan masih kurang mencukupi kebutuhan dasar. Pemerataan: Terdapat kendala dalam distribusi bantuan, terutama di wilayah terpencil. Responsivitas: Program dinilai belum sepenuhnya merespons kebutuhan khusus kelompok rentan.” Relevansi dengan penelitian ini ialah pendekatan metode yang digunakan serupa sehingga dapat menjadi referensi untuk perbandingan hasil.

*“Penelitian oleh Sudarno Sumarto, et al. (2018) Judul: Impact Evaluation of BPNT: How Effective is the Food Assistance Program in Indonesia? Metode: Studi kuantitatif menggunakan data distribusi BPNT, angka kemiskinan, dan survei skala Likert. Wawancara kualitatif dilakukan dengan pemangku kepentingan dan penerima manfaat di tiga provinsi. Hasil: Efisiensi: BPNT dinilai lebih efisien dibandingkan program bantuan pangan tunai sebelumnya karena penurunan biaya distribusi sebesar 20%. Efektivitas: Program mampu meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga penerima manfaat, meskipun ada hambatan distribusi di wilayah terpencil. Kecukupan: 65% responden merasa bantuan pangan cukup untuk kebutuhan satu minggu. Pemerataan: Masih terdapat kesenjangan penerima manfaat antara perkotaan dan pedesaan. **Responsivitas:** BPNT dinilai responsif terhadap kebutuhan penerima manfaat, namun implementasi teknologi kartu elektronik memerlukan penyesuaian lebih lanjut”. Relevansi: Penelitian ini memberikan gambaran tentang evaluasi dimensi efektivitas dan responsivitas BPNT.*

“Penelitian oleh Nurhasanah, A., & Wicaksono, B. (2021) Judul: Analisis Evaluasi Program Bantuan Sosial PKH dan BPNT di Kabupaten Banyumas. Metode: Menggunakan data kuantitatif dari laporan anggaran dan angka kemiskinan daerah. Survei skala Likert dilakukan terhadap 150 penerima manfaat untuk dimensi efektivitas, kecukupan, pemerataan, dan responsivitas. Analisis kualitatif dilakukan melalui wawancara dengan petugas lapangan dan kepala keluarga penerima manfaat. Hasil: Efisiensi: Distribusi bantuan di kabupaten menunjukkan penggunaan anggaran yang sesuai dengan penurunan angka kemiskinan lokal sebesar 2%. Efektivitas: 70% penerima manfaat merasa program berhasil meningkatkan taraf hidup mereka. Kecukupan: Responden menilai bahwa besaran bantuan masih perlu ditingkatkan untuk kebutuhan pendidikan dan kesehatan. Pemerataan: Distribusi bantuan lebih merata di wilayah perkotaan dibandingkan pedesaan. Responsivitas: Responden mengapresiasi mekanisme pengaduan online, meskipun masih ada keterlambatan penanganan”. Relevansi: Studi ini relevan dalam skala lokal dan menggunakan pendekatan serupa dengan penelitian Anda.

“Penelitian oleh Bappenas (2020) Judul: Evaluasi Dampak Program PKH terhadap Kemiskinan dan Ketahanan Sosial di Indonesia. Metode: Analisis kuantitatif dengan data makro nasional tentang anggaran PKH dan tingkat kemiskinan. Survei terhadap 300 penerima manfaat dilakukan untuk mengukur dimensi efektivitas, kecukupan, dan responsivitas. Data kualitatif dikumpulkan melalui focus group discussion (FGD) dengan pemangku kepentingan. Hasil: Efisiensi: Penurunan kemiskinan di tingkat nasional mencerminkan efisiensi alokasi dana PKH.

Efektivitas: 85% responden merasa bantuan PKH membantu mereka mengakses layanan kesehatan dan pendidikan. Kecukupan: Hanya 60% responden yang merasa bantuan mencukupi kebutuhan dasar. Pemerataan: Program dinilai cukup merata, tetapi masih terdapat perbedaan cakupan antara daerah tertinggal dan perkotaan. Responsivitas: Responden mengapresiasi adanya pendamping sosial, tetapi mengeluhkan jumlah pendamping yang masih kurang". Relevansi: Studi ini memberikan gambaran tentang evaluasi berbasis data kuantitatif dan kualitatif dengan fokus pada PKH.

Kesimpulan penelitian terdahulu dimensi efisiensi: Program PKH dan BPNT menunjukkan efisiensi dalam alokasi anggaran yang terkait langsung dengan penurunan angka kemiskinan. Dimensi efektivitas: Sebagian besar penerima manfaat merasa program ini efektif meningkatkan kesejahteraan, meskipun implementasi di daerah terpencil memerlukan perhatian lebih. Dimensi Kecukupan: Besaran bantuan sering dianggap masih kurang mencukupi untuk kebutuhan dasar, terutama di daerah miskin. Dimensi Pemerataan: Masalah pemerataan distribusi sering terjadi, terutama di wilayah terpencil. Dimensi responsivitas: Respons terhadap kebutuhan penerima manfaat masih perlu ditingkatkan, terutama dalam pengelolaan aduan dan keterlibatan masyarakat.

Kebaruan Penelitian

Penelitian ini menawarkan tiga aspek kebaruan utama yang memberikan kontribusi signifikan terhadap evaluasi program bantuan sosial PKH dan BPNT:

1. **Evaluasi pemerataan dengan fokus ketepatan sasaran:** Penelitian ini secara mendalam mengeksplorasi aspek pemerataan dengan menyoroti exclusion error (keluarga miskin yang tidak menerima bantuan) dan inclusion error (keluarga tidak miskin yang tetap menerima bantuan). Selain itu, penelitian ini juga mengkaji relevansi kriteria kemiskinan nasional terhadap kondisi lokal di Provinsi Sulawesi Barat. Fokus ini memberikan perspektif baru yang lebih komprehensif dalam menilai ketepatan sasaran dan distribusi program bantuan sosial.
2. **Pendekatan *Mixed-methods* secara sequential:** Penelitian ini menggabungkan data kuantitatif (survei penerima manfaat, data anggaran, dan angka kemiskinan) dengan data kualitatif (wawancara mendalam dan pengalaman praktis peneliti dalam pengelolaan DTKS). Pendekatan ini memberikan analisis yang lebih holistik, mendalam, dan relevan, mencakup aspek statistik dan konteks sosial program bantuan sosial.
3. **Paradoks efisiensi program:** Penelitian ini mengidentifikasi paradoks dalam dimensi efisiensi, yaitu peningkatan anggaran yang diiringi dengan peningkatan jumlah penerima dan angka kemiskinan. Temuan ini memberikan perspektif baru dalam mengevaluasi hubungan antara efisiensi anggaran dan dampak program, serta menyoroti perlunya evaluasi yang lebih mendalam terhadap mekanisme alokasi anggaran untuk memastikan efisiensi yang optimal.

Ketiga aspek ini menawarkan kontribusi penting baik untuk kajian akademis maupun untuk pengembangan kebijakan bantuan sosial yang lebih adaptif, efisien, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat miskin.

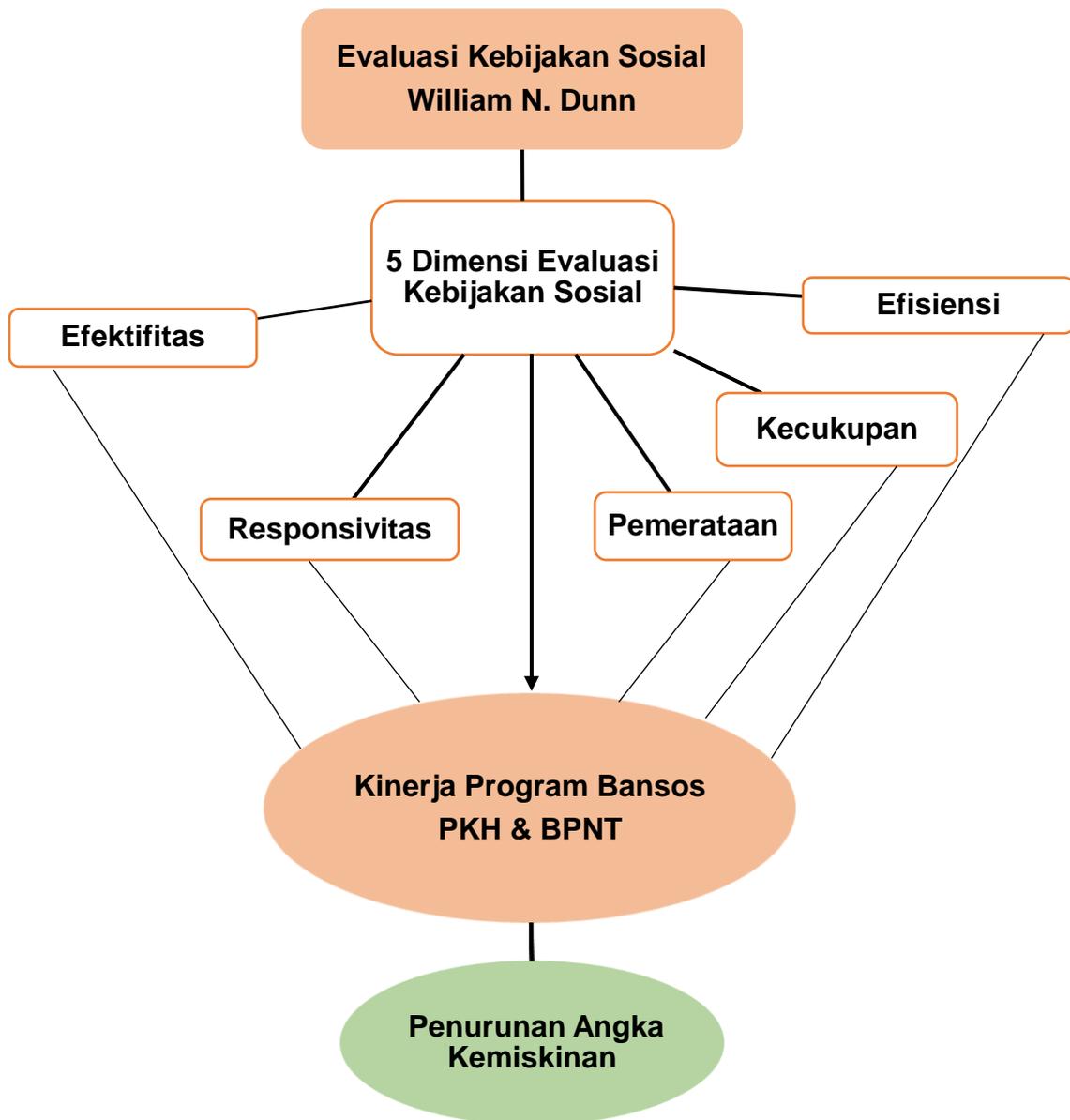
Kerangka Konseptual Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi kebijakan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) menggunakan lima dimensi evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn, yang meliputi: Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, dan Responsivitas. Kerangka konseptual disusun sebagai berikut:

1. Teori Evaluasi Kebijakan (William N. Dunn): Evaluasi kebijakan bertujuan untuk menilai kinerja program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dimensi utama yang digunakan dalam evaluasi ini adalah: Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Ketepatan, dan Responsivitas.
2. Kemiskinan: Kemiskinan adalah kondisi yang menjadi sasaran utama dari program PKH dan BPNT, yang bertujuan untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin melalui bantuan sosial.
3. Program Bantuan Sosial: Program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya yang berada dalam kondisi miskin.

4. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT): Program bantuan sosial berbentuk non-tunai untuk keluarga miskin guna meningkatkan ketahanan pangan.
5. Program Keluarga Harapan (PKH): Program bantuan sosial yang diberikan dengan syarat peningkatan kualitas hidup keluarga miskin.
6. Kinerja Program PKH dan BPNT: Penilaian terhadap kinerja kedua program bantuan sosial tersebut berdasarkan lima dimensi evaluasi kebijakan.

Diagram Kerangka Konseptual



Gambar 2. 1. Kerangka konseptual penelitian
Sumber: Diadopsi dari William N. Dunn (2003)

Operasionalisasi Konseptual

Berikut adalah operasionalisasi dari konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini:

Tabel 2. 2. Operasionalisasi Konseptual

Dimensi Evaluasi	Definisi Operasional
Efektivitas	Mengukur sejauh mana tujuan kebijakan bantuan sosial PKH dan BPNT tercapai dalam memenuhi kebutuhan dasar penerima manfaat.
Efisiensi	Mengukur sejauh mana bantuan PKH dan BPNT dialokasikan secara efisien dalam mencapai penurunan angka kemiskinan.
Kecukupan	Menilai apakah jumlah bantuan yang diterima cukup dalam membantu penerima memenuhi kebutuhan dasar mereka.
Pemerataan	Fokus pada ketepatan sasaran program. Menilai apakah distribusi bantuan PKH dan BPNT telah mencapai seluruh keluarga miskin yang membutuhkan.
Responsivitas	Menilai sejauh mana bantuan yang diterima disesuaikan dengan kondisi kemiskinan dan kebutuhan khusus masing-masing penerima.
Penurunan Angka Kemiskinan	Menilai sejauh mana program PKH dan BPNT berhasil membantu dan mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin.